

## **ANALISA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BLORA**

Oleh;

Christina Nur Widayati<sup>1)</sup>, Sulistiyarini<sup>2)</sup>,

<sup>1)</sup> Dosen Universits An Nuur, email: [christinawidayati83@gmail.com](mailto:christinawidayati83@gmail.com)

<sup>2)</sup> Dosen Universitas An Nuur

### **ABSTRAK**

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek karena tinggi tubuhnya berada dua standar deviasi dibawah rata-rata. Keadaan tersebut merupakan kegagalan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis terjadi dalam waktu yang panjang. Terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, selain itu juga terhambatnya perkembangan kognitif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu Kepala BAPPEDA Blora, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Dinas Dalduk KB, OPD, Ketua TP PKK Blora, Bidan dan Kader Posyandu. Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil analisa dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan stunting terintegrasi sudah dilakukan namun masih belum maksimal , Sudah terdapat Kebijakan Pencegahan stunting Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada program kebijakan tersebut yang belum terlaksana secara optimal. Selain itu sudah terbentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) di seluruh Tingkat kecamatan, bahkan sudah sampai Desa dan Kelurahan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kebijakan, Pencegahan, Stunting, Terintegrasi

*ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STUNTING PREVENTION POLICIES  
IN BLORA DISTRICT*

By

Christina Nur Widayati<sup>1)</sup>, Sulistiyarini<sup>2)</sup>,

<sup>1)</sup> Lecturer at An Nuur University, email: [christinawidayati83@gmail.com](mailto:christinawidayati83@gmail.com)

<sup>2)</sup> Lecturer at An Nuur University

*ABSTRACT*

*Stunting is a short body condition because the height is two standard deviations below the average. This situation is a failure of child growth due to chronic malnutrition occurring in a long time. Especially in the first 1000 days of life, besides that it also hampers cognitive development. The method used in this research is descriptive qualitative research. In this study using a qualitative research approach using phenomenological methods. The sources of data in this study were the Head of BAPPEDA Blora, the Blora District Health Office, the Dalduk KB Office, OPD, the Head of Blora PKK TP, Midwives and Posyandu Cadres. The purpose of this research is how to implement an integrated stunting prevention policy in Blora district. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of integrated stunting prevention has been carried out but is still not optimal. optimal. In addition, a Team for the Acceleration of Stunting Management (TPPS) has been formed at all sub-district levels, even reaching villages and sub-districts.*

*Keywords: Implementation, Policy, Prevention, Stunting, Integrated*

## PENDAHULUAN

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek karena tinggi tubuhnya berada dua standar deviasi dibawah rata-rata. Keadaan tersebut merupakan kegagalan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis terjadi dalam waktu yang panjang. Terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, selain itu juga terhambatnya perkembangan kognitif.

Di Indonesia, berdasarkan data Pemantauan status Gizi ( Kemenkes, 2017) stunting mencapai 29,6 % dengan 19,8 % diantaranya berada dalam kategori sangat pendek.

Stunting juga di sebutkan sebagai masalah kemanusiaan tidak hanya masalah kesehatan semata dan juga bukan faktor genetik., dimana dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) disebutkan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hasil Survey Status Gizi Indonesia( SSGI) tahun 2021 berada di angka 21,5 persen, dan berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Bernasis Masyarakat (Eppgbm) di angka 7,87 persen. Berdasarkan data tersebut masih banyak kejadian staunting di

Kabupaten Blora. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan penurunan dan pencegahan stunting, sehingga dapat menekan kejadian terjadinya stunting.

Penyelenggaraan pelaksanaan pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama lintas sektor dan bukan tanggung jawab dari salah satu institusi saja. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah tim lintas sektor sehingga dapat dilaksanakan Aksi Integrasi

Secara umum terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Blora, sudah banyak upaya yang dilakukan. Bahkan inovasi-inovasi yang sudah dibuat dari para pemangku kepentingan untuk menekan angka kejadian stunting.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Blora mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana melalui regulasi tersebut dilakukan intervensi gizi spesifik yang ditujukan pada anak 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan intervensi gizi sensitif yang akan dilakukan oleh lintas sektor dengan sasaran semua masyarakat. Peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan status gizi masyarakat dan

kualitas sumber daya manusia dengan strategi yang akan dilakukan adalah edukasi, pelatihan dan penyuluhan kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, dan memperkuat gerakan seribu hari pertama kehidupan. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran dinas kesehatan dan OPD/Lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang upaya penanggulangan stunting terintegrasi dengan mengangkat judul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Stunting Terintegrasi di kabupaten Blora”

## **METODOLOGI**

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang pada akhirnya diselesaikan dengan data dalam bentuk kata-kata, gambar, bukanlah angka-angka. Informasi dalam penelitian ini di tentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2012) menjelaskan teknik *purposive sampling* merupakan cara untuk memilih informasi dengan mempertimbangkan pilihan yang relevan dengan permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode fenomenologi. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : Kepala BAPPEDA Blora, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Dinas Dalduk KB, OPD, Ketua TP PKK Blora, Bidan dan Kader Posyandu.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dan bukti dokumentasi. Uji dalam keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu mengolah data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan untuk dijabarkan dalam beberapa paragraf. Selanjutnya data yang didapat dilakukan analisa secara reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pencegahan Stunting**

.Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora mengatakan berbagai inovasi yang dilakukan dalam penurunan dan pencegahan stunting sudah dilakukan berbagai pihak untuk bersama-sama mengatasi stunting. Layanan inovasi yang dilakukan adalah Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA). Inovasi berikutnya, Terapi Baru Perbaikan Gizi Dengan Kelorina (TEBAR PEZONA), Gerak Ulur Atasi Stunting (GELURANTING) dan Beri Pijat Oksitosin dengan Minyak Essensial Lavender

(BERAKSI). Ada juga Kader Peduli Bayi dan Balita Beresiko (KALIBABAR), Tepung Kelor untuk Emak /Ibu Menyusui (TELOR MAKSI) serta Gerakan terpadu Kesehatan Ibu dan anak (GERDU KIA). Berikutnya inovasi yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat bawah. Dinamakan, Lomba Desa/Kelurahan Stunting, Kelompok Pendukung Air Susu Ibu (KP-ASI), Laborat Stunting. Selain itu ada Kampus Peduli Stunting dan Pendampingan stunting dari CSR, UMKM, RS, ORMAS. Selain itu juga dari OPD yang lainnya juga turut serta bersinergi terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting.

Dari Dinas Dakdul KB juga ikut serta dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting, adapun inovasi yang dilakukan dengan teman KB yaitu dengan adanya gardu KIA-KB, gerakan terpadu pada Keluarga Bencana, termasuk didalamnya terdapat gerakan Rembo Setia, Remaja Blora Sehat tanpa Anemia.

Adanya inovasi dari TP PKK kabupaten Blora yang anggotanya adalah Dawis Penting (Dasawisma Pendamping Stunting Khususnya pada 45 desa yang prioritas pengendalian stunting.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting, TP PKK Blora menyatakan bahwa dukungan dari tingkat

kabupaten hingga tingkat desa harus saling bersinergi sehingga tujuan akan tercapai.

Dari sekian banyaknya program dalam penanggulangan stunting di kabupaten Blora, telah dilakukan upaya dalam melakukan bimbingan dengan mengajak berdiskusi dengan OPD. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengarahan dan dorongan serta memotivasi dalam pelaksanaan kegiatan agar lebih sering berkoordinasi dan mengintegrasikan. Harapannya akan menghasilkan outcam yang tidak hanya sekedar penyelesaian administrasi program semata, seperti yang biasa dilakukan di seluruh OPD yang bersangkutan..

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kabupaten Blora sudah terbentuk Tim Teknis dan Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting. Yang disebut dengan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS). TPPS ini sudah dibentuk di seluruh Tingkat kecamatan, bahkan sudah sampai Desa dan Kelurahan.

Sedangkan dilihat dari sisi Regulasi kabupaten Blora sudah ada Regulasi yang di buat untuk upaya pencegahan stunting. Adapun Kebijakan tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Untuk bisa di terapkan regulasi tersebut sudah dibentuk tim koordinasi penanggulangan stunting dan

regulasi lainnya yang mendukung dalam penanganan stunting.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2016) Implementasi Kebijakan akan saling berkesinambungan dengan kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan. Dalam hal ini berarti Kebijakan dalam pelaksanaannya pastinya melibatkan berbagai kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa dampak terhadap implementasi.

## **2. Pelaksanaan Koordinasi Program**

Berdasarkan hasil penelitian, yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber, menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Blora sudah dilakukan oleh semua OPD. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana kegiatan pencegahan stunting yang sudah di sepakati oleh masing-masing OPD Pelaksana. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilakukan dengan maksimal. Diantaranya pemerataan distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri melalui sekolah, Terapi Baru Perbaikan Gizi Dengan Kelorina (TEBAR PEZONA). Berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan lainnya yg tidak bisa dilakukan secara terpadu.

Pelaksanaan pencegahan stunting terintegrasi sudah dilakukan secara berjenjang bahkan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, akan tetapi masih ada ditemukan hambatan-hambatan, seperti kendala dalam metode pendekatan ke masyarakat dan koordinasi antar pelaksana program pencegahan stunting terintegrasi belum maksimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan stunting terintegrasi sudah dilakukan namun masih belum maksimal, Dikarenakan masih ada hambatan-hambatan secara teknis yang terjadi dalam pelaksanaan di masing-masing OPD. Sudah terdapat Kebijakan Pencegahan stunting Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada program kebijakan tersebut yang belum terlaksana secara optimal. Selain itu sudah terbentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) di seluruh Tingkat kecamatan, bahkan sudah sampai Desa dan Kelurahan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ayuningtyas, D. (2018). Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi (1st ed.). Depok: Rajawali Pers
- Buku saku desa dalam penanganan stunting. Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting, 2–13.
- Dumilah Ayuningtyas. 2018. Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada: 2018
- Fikawati, S. (2017). Gizi Anak dan Remaja (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Gurning, F. P. (2018).
- Kemenkes RI. (2018a). Buletin Stunting. Kementerian Kesehatan RI, 1, 2.
- Kemenkes RI. (2018b). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mitra. 2015. Permasalahan Anak Pendek (*Stunting*) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya *Stunting* (Suatu Kajian Kepustakaan). Jurnal Kesehatan Komunitas, Volume 2 Nomor 6.
- Mulyadi, D. (2016). *studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tohirin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling, cet. Ke dua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2)
- Wahab, Abdul & Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardoyo, Hasto, (2001), Buku Pintar Stunting Panduan petugas lini lapangan BKKBN, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan